

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis.. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yaitu jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan.

Dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksan sebagaimana dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Upaya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP). Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP).

Kata Kunci : Peran, Jaksa, Penuntut Umum, Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

The aims of this study are as follows: To identify and analyze the role of the Public Prosecutor in prosecuting the accused of corruption. To find out and analyze the efforts that will be made by the Public Prosecutor if the decision handed down by the Corruption Court Judge is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor.

The approach method used in this research is a sociological juridical research method. The specification in this research is analytical descriptive. Based on the results of this study, the role of the Public Prosecutor in Prosecuting Defendants of Criminal Acts of Corruption, namely the public prosecutor in carrying out prosecutions for criminal acts of corruption has been sufficient to prove the fulfillment of the elements of criminal acts of corruption that were violated by the defendant as a result of the actions committed.

Starting from the investigation, prosecution, legal action which then if it already has permanent legal force, the prosecutor's office as in making charges against criminal acts of corruption is regulated in Article 137, Article 139 and Article 143 of the Criminal Procedure Code as well as Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Indonesia, thus giving confidence to the judge that the defendant's actions have violated the criminal provisions he has been charged with.

Efforts will be made by the Public Prosecutor if the decision handed down by the Corruption Court Judge is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor, namely Examination of the Cassation Level for Legal Interests (Article 259 of the Criminal Procedure Code). Review of Court Decisions that have Permanent Legal Force (Article 263 of the Criminal Procedure Code).

Keywords: Role, Public Prosecutor, Crime, Corruption.